

Analisis Kerja Pelayanan Pra dan Pasca Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Dompu

Supriandi¹, Samsudin², Fahrudin³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja pelayanan pra dan pasca bencana kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Dompu memiliki tingkat kerentanan kebakaran tinggi akibat iklim kering, kepadatan permukiman, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap standar keselamatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, didukung data primer (kuesioner dan wawancara) serta data sekunder (dokumen instansi, kebijakan, dan literatur kebencanaan). Sampel penelitian sebanyak 40 responden dipilih melalui purposive sampling, terdiri atas personel operasional, administrasi, relawan, dan pejabat struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pra-bencana, kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta kesiapsiagaan peralatan telah dilakukan, namun masih terkendala keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan teknologi deteksi dini. Pada tahap pasca-bencana, penanganan meliputi evakuasi, pemadaman, pemulihan fisik, serta dukungan psikososial, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kurangnya koordinasi lintas instansi dan keterbatasan logistik. Kesimpulannya, penanganan kebakaran di Kabupaten Dompu menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, pemutakhiran teknologi, serta kolaborasi lintas sektor agar strategi pra dan pasca bencana dapat terintegrasi secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan, sistem komunikasi terintegrasi, serta penerapan prinsip *build back better* dalam rekonstruksi pasca-bencana.

Kata kunci: Kebakaran, Pra-Bencana, Pasca-Bencana, Pemadam Kebakaran, Kabupaten Dompu

Abstract

This study aims to analyse the performance of pre- and post-fire disaster services at the Dompu District Fire Department, West Nusa Tenggara. Dompu District has a high vulnerability to fires due to its dry climate, high population density, and low public awareness of safety standards. The research uses a quantitative approach with a descriptive method, supported by primary data (questionnaires and interviews) and secondary data (agency documents, policies, and disaster literature). The research sample consisted of 40 respondents selected through purposive sampling, comprising operational personnel, administrators, volunteers, and structural officials. The results of the study indicate that in the pre-disaster stage, socialisation, training, and equipment preparedness activities have been carried out, but are still constrained by limited budgets, infrastructure, and early detection technology. In the post-disaster phase, response efforts included evacuation, firefighting, physical recovery, and psychosocial support; however, their effectiveness was hindered by inadequate inter-agency coordination and logistical constraints. In conclusion, fire management in Dompu Regency requires institutional capacity building, technological updates, and cross-sectoral collaboration to ensure that pre- and post-disaster strategies are optimally integrated. This study recommends improved training, an integrated communication system, and the application of the build back better principle in post-disaster reconstruction.

Keywords: Fire, Pre-Disaster, Post-Disaster, Fire Department, Dompu Regency

Copyright (c) 2025 Supriandi

 Corresponding author :

Email Address : supriandiii04@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Dompu, yang terletak di pesisir timur Pulau Sumbawa, merupakan salah satu wilayah di Nusa Tenggara Barat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana kebakaran. Letak geografis yang didominasi oleh iklim kering pada musim kemarau, ditambah dengan struktur permukiman yang padat dan penggunaan material bangunan dari kayu, menjadi faktor signifikan yang meningkatkan risiko penyebaran api

(Nugroho, 2015). Dalam lima tahun terakhir, data menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kejadian kebakaran, baik di wilayah permukiman maupun lahan pertanian.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, mantan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, penyebab kebakaran kerap kali merupakan kombinasi dari faktor alami dan antropogenik (manusia), di mana kelalaian atau ketidaktahuan masyarakat memperparah dampak yang ditimbulkan (Nugroho, 2015). UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penanganan pasca-bencana mencakup tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang bertujuan memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur terdampak (Pasal 1 Ayat 12). Nugroho & Winarno (2019) menekankan bahwa fase rekonstruksi pasca kebakaran harus mengusung prinsip *build back better*—yakni membangun kembali tidak hanya secara fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam mencegah bencana serupa.

Pada tahap pra-bencana, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Dompu memiliki mandat melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran, pelatihan teknis pemadaman bagi relawan dan staf, serta pemetaan titik rawan kebakaran. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga terlatih, dan lemahnya koordinasi lintas sektor, menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan mitigasi (Jefesen, 2022). Faktor lain yang turut memperburuk risiko kebakaran di wilayah pesisir adalah keterbatasan sarana pemadam, kerentanan lingkungan fisik, dan belum memadainya aksesibilitas kendaraan pemadam menuju lokasi kebakaran.

BNPB (2012) mendefinisikan mitigasi kebakaran sebagai serangkaian tindakan teknis dan non-teknis untuk mengurangi potensi terjadinya kebakaran atau dampak yang ditimbulkan, seperti pendidikan masyarakat, pembuatan sekat api, inspeksi bangunan, dan perawatan alat pemadam. Hambyah (2017) menambahkan bahwa kebijakan pencegahan kebakaran harus mampu menciptakan sistem kerja petugas yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga dapat meminimalkan korban jiwa dan kerugian material.

Tahap pasca-bencana memiliki peranan strategis dalam pemulihan, yang meliputi operasi penyelamatan, evakuasi korban, penanganan medis darurat, hingga pemberian dukungan psikososial. Namun, evaluasi internal menunjukkan masih terdapat masalah pada koordinasi antar instansi, hambatan logistik, dan ketiadaan kendaraan khusus untuk respons darurat cepat (Prasetyo, 2019). Penelitian Cahyadi et al. (2022) menegaskan pentingnya pelatihan rutin personel dan sistem komunikasi terintegrasi untuk meningkatkan responsivitas lembaga pemadam kebakaran.

Analisis menyeluruh terhadap kinerja pelayanan pra dan pasca-bencana kebakaran menjadi krusial untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan peluang perbaikan dalam manajemen kebakaran. Kajian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan koordinasi lintas sektor, sehingga terwujud sistem manajemen kebakaran yang responsif, proaktif, dan berkelanjutan demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul “Analisis Kerja Pelayanan Pra dan Pasca Bencana Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Dompu.”

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang terukur mengenai kinerja pelayanan pra dan pasca-bencana kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Dompu. Metode deskriptif dianggap relevan karena mampu mendeskripsikan fakta, karakteristik, serta hubungan antarvariabel secara sistematis dan faktual sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki tugas pokok dalam pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca-bencana kebakaran. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yakni mulai Maret hingga Mei 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian.

Populasi penelitian meliputi seluruh personel Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Dompu, baik pegawai tetap, tenaga honorer, maupun relawan yang terlibat langsung dalam pelayanan pra dan pasca-bencana. Dari populasi ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan responden yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam kegiatan penanggulangan kebakaran. Sampel penelitian berjumlah 40 orang, yang terdiri atas personel operasional lapangan, petugas administrasi, relawan, dan pejabat struktural.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terstruktur dengan pejabat Dinas Pemadam Kebakaran, sementara data sekunder diperoleh dari laporan resmi instansi, dokumen kebijakan, publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta referensi buku dan jurnal ilmiah. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi responden terhadap dua aspek utama, yaitu pelayanan pra-bencana (seperti sosialisasi, pelatihan, kesiapsiagaan peralatan, dan koordinasi) serta pelayanan pasca-bencana (meliputi respon tanggap darurat, pemulihan, rekonstruksi, dan dukungan psikososial).

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap kegiatan pra dan pasca-bencana kebakaran, penyebaran kuesioner, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kinerja pelayanan, serta uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara pelayanan pra dan pasca-bencana terhadap efektivitas penanggulangan kebakaran. Data wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif untuk memperkaya interpretasi temuan kuantitatif.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen kuesioner, serta menerapkan triangulasi data dengan membandingkan hasil dari observasi, kuesioner, dan wawancara. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh dan akurat tentang sejauh mana kinerja pelayanan pra dan pasca-bencana di Kabupaten Dompu, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan kebakaran secara efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dompu, Bidang Pemadam Kebakaran yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Karijawa Dompu, diketahui bahwa unit ini dipimpin oleh Bapak Sukardin HS, S.Sos., M.Ap., dengan Kepala Bidang Bapak Rifaid, S.Sos., dan Kepala Seksi Bapak Chairul, S.Sos. Jumlah petugas pemadam kebakaran sebanyak 32 orang, dibagi ke dalam tiga regu dengan sistem kerja shift pagi (07.30–12.00), shift siang (12.00–17.30), dan piket malam (19.30–selesai). Sarana operasional meliputi empat unit mobil pemadam dan dua unit peralatan tambahan. Gaji pokok petugas adalah Rp700.000,- per bulan, ditambah insentif sebesar Rp550.000,-.

Hasil wawancara mengidentifikasi bahwa tugas pokok pemadam kebakaran meliputi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya, penyelidikan kebakaran, pemeliharaan sarana prasarana, koordinasi lintas instansi, pelatihan dan pembinaan masyarakat, serta pelaporan dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa peran pemadam kebakaran tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif (Kemendagri, 2018).

Potensi risiko kebakaran di Kabupaten Dompu cukup tinggi, dipengaruhi oleh faktor kelalaian manusia seperti merokok sembarangan atau lupa mematikan kompor, peralatan rusak, keberadaan bahan mudah terbakar, sumber panas berlebih, serta faktor alam seperti petir dan suhu ekstrem. Kondisi pemukiman padat dengan bahan bangunan kayu menambah kerentanan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepadatan bangunan dan rendahnya kesadaran masyarakat berbanding lurus dengan tingkat risiko kebakaran (Suryanto & Rahmawati, 2020).

Upaya mitigasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pencegahan, persiapan, dan kesiapsiagaan. Pencegahan dilakukan dengan identifikasi dan eliminasi sumber bahaya, edukasi masyarakat, penyediaan alat pemadam api ringan (APAR), dan pembuatan jalur evakuasi. Persiapan meliputi penyusunan rencana tanggap darurat, pelatihan dan simulasi, pemasangan detektor asap, dan penggunaan material tahan api. Kesiapsiagaan dilakukan dengan pemantauan rutin, penyebaran informasi, patroli di daerah rawan, dan penegakan aturan pembakaran lahan. Langkah-langkah ini selaras dengan konsep *fire risk reduction* yang dianjurkan oleh NFPA yang menekankan kombinasi *engineering, education, and enforcement* (NFPA, 2019).

Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kesiapsiagaan kebakaran dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Materi meliputi pemahaman risiko, penggunaan APAR, prosedur evakuasi, serta pembentukan budaya keselamatan. Simulasi kebakaran menjadi salah satu metode efektif untuk memperkuat kesiapan masyarakat. Penelitian Prabowo (2021) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis simulasi meningkatkan respon evakuasi hingga 45% lebih cepat dibandingkan tanpa pelatihan. Sistem peringatan dini kebakaran di Kabupaten Dompu saat ini masih sederhana, berupa komunikasi antar warga dan petugas. Idealnya, sistem ini mengadopsi teknologi deteksi dini berbasis sensor asap, panas, dan gas, terintegrasi dengan notifikasi SMS atau aplikasi, serta dilengkapi jalur evakuasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan temuan Sutanto (2020) yang menyatakan bahwa integrasi IoT pada sistem deteksi kebakaran dapat mempersingkat waktu respon hingga 60%.

Pembahasan Umum

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tugas pokok dan prosedur mitigasi telah dijalankan sesuai standar, masih terdapat keterbatasan pada aspek pendanaan, sarana prasarana, dan teknologi pendukung. Peningkatan kapasitas petugas, pemutakhiran sistem deteksi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap kebakaran.

Kesiapsiagaan Kebakaran

Prosedur evakuasi saat kebakaran perlu dilakukan dengan peralatan lengkap sesuai standar keamanan dan keselamatan guna mengurangi risiko kecelakaan (Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, wawancara, 2024). Menurut penjelasan beliau, prosedur evakuasi melibatkan tindakan cepat dan terorganisir untuk memastikan keselamatan semua orang, meliputi: tetap tenang, segera menuju tangga darurat, tidak menggunakan lift, membantu yang membutuhkan, berkumpul di titik kumpul, serta mengikuti instruksi petugas.

Secara umum, langkah-langkah evakuasi kebakaran mencakup:

1. Tetap tenang – menghindari kepanikan agar keputusan yang diambil tepat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2023).
2. Bunyikan alarm jika memungkinkan, untuk memperingatkan orang lain.
3. Evakuasi cepat dan tertib dengan mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan.
4. Gunakan tangga darurat dan hindari lift.
5. Bantu yang membutuhkan, seperti lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas.
6. Periksa ruangan sebelum meninggalkan area terakhir.
7. Hindari membawa api selama evakuasi.
8. Berhimpun di titik kumpul yang telah ditetapkan.
9. Tidak kembali ke gedung kecuali atas instruksi petugas.
10. Laporkan kehilangan atau cedera pada petugas berwenang.

BNPB (2023) juga menambahkan bahwa kesiapan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kebiasaan mengenali jalur evakuasi, mengikuti latihan evakuasi, dan menyiapkan perlengkapan darurat seperti senter, obat pribadi, dan dokumen penting. Pelatihan evakuasi kebakaran, yang rutin dilakukan, merupakan simulasi untuk mempersiapkan individu merespons situasi darurat secara efektif. Tujuannya adalah melatih peserta mengenali bahaya kebakaran, mengikuti rute evakuasi yang benar, dan menggunakan peralatan pemadam kebakaran dasar (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022). Manfaat pelatihan meliputi peningkatan kesadaran, mempercepat proses evakuasi, menjaga ketenangan, serta meminimalisir korban jiwa dan kerugian.

Langkah pelatihan mencakup penyuluhan, simulasi, praktik penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan evaluasi pasca-simulasi. Latihan sebaiknya dilakukan minimal setiap enam bulan sekali untuk mempertahankan kesiapan (International Fire Safety Standards Coalition, 2021). Selain pelatihan, pengembangan sistem komunikasi efektif juga menjadi faktor penting. Sistem notifikasi massal yang mengintegrasikan SMS, WhatsApp, email, telepon, dan pengeras suara terbukti membantu peringatan dini. Dukungan media sosial, papan informasi, radio, televisi, serta komunikasi dua arah mempercepat distribusi informasi saat kebakaran (BNPB, 2023). Pesan yang disampaikan harus jelas, ringkas, mudah dipahami, dan memberikan instruksi tindakan yang tepat. Koordinasi antar instansi terkait menjadi kunci keberhasilan komunikasi darurat.

Penanganan Pasca-Bencana: Kebakaran

Penanganan pasca-bencana kebakaran terdiri dari dua fase utama, yaitu penanganan darurat dan pemulihan (BNPB, 2023). Tahap ini dilakukan segera setelah terdeteksi adanya kebakaran. Proses evakuasi dan penyelamatan korban melibatkan beberapa tahapan mulai dari deteksi dini, peringatan, hingga tindakan penyelamatan dan pemadaman (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022).

1. Deteksi dini dan peringatan: Penting mengenali tanda-tanda kebakaran seperti bau asap, asap terlihat, suhu ruangan meningkat, atau bunyi alarm kebakaran. Segera laporkan kejadian ke pihak keamanan atau hubungi nomor darurat, seperti pemadam kebakaran 113. Jika memungkinkan, bunyikan alarm untuk memperingatkan orang lain dan matikan peralatan listrik atau sumber api yang berpotensi membesar (International Fire Safety Standards Coalition, 2021).
2. Proses evakuasi: Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2023), kunci utama evakuasi adalah kecepatan, ketenangan, dan koordinasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi tetap tenang, mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan, membantu orang yang membutuhkan (lansia, anak-anak, penyandang disabilitas), menghindari asap dengan menutup hidung/mulut menggunakan kain, tidak kembali masuk ke area kebakaran, dan berkumpul di titik kumpul.
3. Penyelamatan dan pemadaman: Bantuan petugas pemadam kebakaran merupakan hal vital. Pemadaman awal dapat dilakukan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jika situasi aman. Petugas pemadam dan keamanan akan berkoordinasi untuk penyelamatan dan melakukan penyisiran guna memastikan tidak ada korban tertinggal (Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, wawancara, 2024).
4. Persiapan evakuasi: Kesiapsiagaan dapat ditingkatkan dengan mengenali jalur evakuasi, latihan evakuasi berkala, dan menyiapkan perlengkapan darurat seperti senter, P3K, dan pakaian hangat (BNPB, 2023).

Selain itu, tim medis, relawan, serta dukungan pemerintah atau lembaga kemanusiaan biasanya terlibat untuk memberikan bantuan medis, uang tunai, logistik, pakaian layak pakai, dan material untuk perbaikan.

Pemulihan Pasca Kebakaran

Pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi fisik, psikologis, dan operasional pasca terjadinya kebakaran (BNPB, 2023). Proses ini mencakup:

Pemulihan fisik dan peralatan

1. Pemeriksaan dan perbaikan peralatan: Semua peralatan pemadam kebakaran, termasuk APAR, selang, dan sistem sprinkler, harus diperiksa dan diperbaiki sebelum digunakan kembali (IFSS, 2021).
2. Overhaul pasca kebakaran: Pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik api tersisa, sehingga mencegah kebakaran susulan.
3. Pengembalian peralatan/barang: Jika ada barang atau uang titipan dari korban, pihak pemadam kebakaran perlu mengembalikannya untuk menghindari kesalahpahaman (Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, wawancara, 2024).

Pemulihan psikologis

1. Dukungan psikologis: Korban dan petugas pemadam sering mengalami trauma; perlu diberikan pendampingan mental.
2. Penanganan PTSD: Petugas yang mengalami *Post-Traumatic Stress Disorder* harus mendapatkan bantuan profesional (Kemenkes RI, 2022).
3. Pemulihan area terdampak
4. Evaluasi keamanan: Struktur bangunan, instalasi listrik, dan jaringan pipa diperiksa sebelum izin masuk kembali diberikan.
5. Perizinan masuk kembali: Pihak berwenang hanya mengizinkan pemanfaatan area setelah dinyatakan aman (BNPB, 2023).

Pentingnya Pemulihan

Pemulihan merupakan bagian penting untuk:

1. Mencegah kebakaran susulan melalui overhaul dan pemeriksaan lanjutan.
2. Memastikan kesiapan peralatan dan personel menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
3. Memulihkan kondisi mental korban dan petugas.
4. Mengembalikan kehidupan normal masyarakat di area terdampak.

Dengan prosedur penanganan darurat dan pemulihan yang tepat, dampak kebakaran dapat diminimalkan, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian material.

Penanganan Pasca-Bencana Kebakaran: Strategi Darurat dan Pemulihan

Penanganan pasca-bencana kebakaran merupakan rangkaian langkah terstruktur yang bertujuan meminimalkan korban jiwa, kerugian materi, serta dampak psikologis pada korban dan petugas. Proses ini terbagi ke dalam tahap penanganan darurat dan tahap pemulihan, yang keduanya harus dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi (BNPB, 2023).

Tahap Penanganan Darurat

Tahap penanganan darurat dilakukan sejak terdeteksi adanya potensi kebakaran hingga kondisi dinyatakan aman oleh otoritas terkait. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan RI (2022), terdapat tiga elemen kunci dalam tahap ini, yaitu deteksi dini, evakuasi terarah, dan pemadaman efektif. Deteksi dini berfungsi sebagai titik awal keberhasilan penanggulangan kebakaran. Tanda-tanda seperti bau asap, peningkatan suhu ruangan, visualisasi asap atau api, serta bunyi alarm kebakaran harus segera diidentifikasi (International Fire Safety Standards Coalition, 2021). Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi:

1. Pelaporan cepat ke unit keamanan atau layanan darurat.
2. Pengaktifan sistem alarm kebakaran untuk memberi peringatan massal.
3. Pemutusan sumber daya listrik dan gas guna mencegah eskalasi api, jika kondisi memungkinkan.

Kecepatan respons pada tahap ini sering kali menentukan besaran kerugian yang akan terjadi (BNPB, 2023). Evakuasi korban merupakan langkah prioritas yang menuntut kecepatan, ketenangan, dan koordinasi tim (BNPB, 2023). Prinsip-prinsip evakuasi mencakup:

1. Menggunakan jalur evakuasi resmi dan menghindari penggunaan lift.
2. Membantu kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

3. Melindungi diri dari asap dengan kain penutup hidung dan mulut.
4. Menghindari kembali ke lokasi kebakaran sebelum ada instruksi resmi.
5. Berkumpul di titik kumpul darurat untuk proses pendataan.

Menurut penelitian Rahman et al. (2021), koordinasi yang baik selama evakuasi dapat mengurangi tingkat fatalitas korban hingga 40%.

Penyelamatan dan Pemadaman

Langkah pemadaman dilakukan secara paralel dengan evakuasi. Pemadaman awal dapat menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mengatasi api berskala kecil, namun proses penanggulangan utama harus dilakukan oleh petugas profesional. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Koordinasi antarpetugas pemadam dan keamanan.
2. Penyisiran lokasi untuk memastikan tidak ada korban tertinggal.
3. Penyelamatan aset vital bila tidak mengancam keselamatan jiwa (Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, wawancara, 2024).

Tahap Pemulihan Pasca Kebakaran

Pemulihan adalah proses strategis yang dimulai setelah api berhasil dipadamkan. Tujuannya adalah mengembalikan kondisi fisik, psikologis, dan fungsional area terdampak (BNPB, 2023).

Pemulihan Fisik dan Peralatan

1. Pemeriksaan dan perbaikan peralatan pemadam kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi insiden berikutnya.
2. Overhaul atau pemeriksaan menyeluruh guna memastikan tidak ada bara api yang tersisa.
3. Pengembalian barang atau dana titipan kepada pemiliknya untuk menjaga transparansi (IFSS, 2021).

Pemulihan Psikologis

Kebakaran sering menimbulkan trauma mendalam, baik bagi korban maupun petugas. Dukungan psikososial menjadi krusial untuk meminimalkan gangguan mental jangka panjang. Penanganan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) harus dilakukan oleh tenaga profesional (Kemenkes RI, 2022).

Pemulihan Area Terdampak

1. Evaluasi keamanan struktur bangunan untuk mencegah risiko lanjutan.
2. Pengecekan instalasi listrik dan pipa sebelum mengizinkan penghuni kembali.
3. Penerbitan izin masuk kembali oleh pihak berwenang setelah area dinyatakan aman (BNPB, 2023).

Signifikansi Tahap Pemulihan

Tahap pemulihan tidak sekadar menormalkan kondisi fisik, melainkan juga memastikan kesiapan menghadapi ancaman di masa depan. Menurut penelitian Wibowo (2020), daerah yang melaksanakan prosedur pemulihan secara komprehensif memiliki tingkat kebakaran ulang 35% lebih rendah dibanding yang tidak.

Manfaat strategis tahap ini meliputi:

1. Pencegahan kebakaran susulan melalui inspeksi menyeluruh.
2. Kesiapan operasional petugas dan peralatan.
3. Pemulihan mental korban dan petugas.
4. Pemulihan fungsi sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Dompu, dapat disimpulkan bahwa penanganan kebakaran membutuhkan sinergi menyeluruh antara kesiapsiagaan pra-bencana dan pemulihan pasca-bencana. Tingginya potensi risiko kebakaran di wilayah ini dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial, seperti kepadatan permukiman, penggunaan material kayu pada bangunan, serta perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan standar keselamatan. Faktor pemicu yang diidentifikasi meliputi kelalaian manusia (merokok sembarangan, lupa mematikan peralatan, membuang puntung rokok menyala), peralatan yang rusak atau tidak sesuai standar (korsleting listrik, overheating), penyimpanan bahan mudah terbakar yang tidak aman, sumber panas berlebih, dan faktor alam (petir, suhu panas ekstrem).

Upaya pra-bencana yang efektif di Kabupaten Dompu meliputi:

1. Mitigasi risiko melalui pengawasan bahan mudah terbakar, inspeksi berkala instalasi listrik, dan perawatan peralatan.
2. Edukasi masyarakat mengenai bahaya kebakaran dan prosedur evakuasi.
3. Simulasi dan latihan evakuasi untuk memastikan respons cepat dan tepat saat bencana terjadi.

Sementara itu, penanganan pasca-bencana difokuskan pada:

1. Operasi evakuasi dan penyelamatan yang cepat, aman, dan terkoordinasi.
2. Pemadaman awal dengan penggunaan APAR bila memungkinkan.
3. Pemulihan fisik dan teknis, termasuk pemeriksaan dan perbaikan peralatan pemadam, serta inspeksi keamanan bangunan terdampak.
4. Pemulihan psikologis bagi korban dan petugas, termasuk penanganan PTSD.
5. Pemulihan sosial-ekonomi, melalui bantuan logistik, material, dan dukungan pemerintah maupun lembaga kemanusiaan.

Dengan mengintegrasikan langkah-langkah pra dan pasca-bencana secara konsisten, Kabupaten Dompu dapat mengurangi tingkat kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas adaptif terhadap ancaman kebakaran di masa mendatang. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinas pemadam kebakaran, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Referensi:

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Pedoman Penanggulangan Kebakaran*. BNPB Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran*. BNPB Press.
- BNPB. (2012). *Pedoman Mitigasi Bencana Kebakaran*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Cahyadi, R., et al. (2022). *Peningkatan Responsivitas Lembaga Pemadam Kebakaran melalui*

- Pelatihan dan Sistem Komunikasi Terintegrasi. Jurnal Kebencanaan*, 8(2), 145–158.
- Hambyah, S. (2017). *Kebijakan Pencegahan Kebakaran untuk Efektivitas Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- International Fire Safety Standards Coalition. (2021). *Fire Safety and Evacuation Guidelines*. IFSS Global.
- International Fire Safety Standards Coalition. (2021). *Fire Safety and Post-Incident Recovery Guidelines*. IFSS Global.
- Jefesen, M. (2022). *Analisis Tantangan Mitigasi Kebakaran di Kawasan Permukiman Padat Pesisir. Jurnal Mitigasi*, 10(1), 55–67.
- Kemendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran pada Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Dukungan Psikologis Pasca-Bencana*. Kemenkes RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *SOP Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*. Kemenaker RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Standar Operasional Prosedur*
- Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. (2024). Wawancara pada tanggal 12 Juni 2024.
- Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. (2024). Wawancara pada tanggal 12 Juni 2024.
- NFPA. (2019). *Fire and Life Safety Educator's Guide*. Massachusetts: National Fire Protection Association.
- Nugroho, S. P. (2015). *Pengantar Manajemen Risiko Bencana di Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Nugroho, S. P., & Winarno, H. (2019). *Build Back Better dalam Rekonstruksi Pascabencana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prabowo, H. (2021). Efektivitas Pelatihan Simulasi Kebakaran terhadap Kesiapsiagaan Masyarakat. *Jurnal Keselamatan Kerja*, 5(1), 33–41.
- Prasetyo, D. (2019). *Koordinasi dan Keterbatasan Sumber Daya dalam Penanggulangan Kebakaran Daerah. Jurnal Manajemen Bencana*, 6(1), 30–42.
- Suryanto, A., & Rahmawati, D. (2020). Analisis Risiko Kebakaran di Permukiman Padat Penduduk. *Jurnal Proteksi Kebakaran*, 8(2), 55–64.
- Sutanto, R. (2020). Penerapan IoT pada Sistem Deteksi Dini Kebakaran. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(3), 145–152.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.